BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini, rata-rata tingkat praktek akuntansi keuangan pada pemerintah daerah berada dalam kondisi yang cukup memuaskan yaitu 79,8% secara rata-rata, angka ini menunjukkan capaian yang lebih baik dari penelitian sebelumnya di angka 52.09% (Setyaningrum & Syafitri, 2012), 60% (Fitriyana & Yuliana, 2010), 72,11% (Misra, 2008), dan 78,82% (Maranatal & Ratmono, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengungkapan laporan keuangan daerah pada awal masa reformasi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010 dibandingkan saat ini yang dimana tren persentasi indeks kepatuhan pengungkapan pada LKPD secara rata-rata meningkat menjadi lebih baik setiap tahunnya.

Koefisien determinasi dari model penelitian ini menunjukkan angka *adjusted R2* sebesar 0,372 yang dapat diartikan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yaitu variabel sosioekonomi, politik dan eksternal dapat menjelaskan variasi dari variabel dependen (praktek akuntansi keuangan pemerintah daerah) sebesar 37,2% dan sisanya (62,8%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Sementara itu, tidak terdapat pengaruh variabel sosioekonomi dan politik terhadap praktek akuntansi keuangan daerah yang ditunjukkan oleh nilai *T*

Statisctic dan *P Values.* Nilai *T Statisctic* lebih kecil daripada Ttabel (1,654) dan *P Values* lebih besar daripada α (0,05). Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hanya faktor eksternal yang mempunyai pengaruh signifikan secara statistik terhadap praktek akuntansi keuangan pemerintahan daerah. Hasil pengujian menunjukkan t-statistik lebih besar daripada T Tabel (2,010 < 1,654) dengan p-value < 0,05 (0.045 < 0.05). Hal tersebut membuktikan bahwa faktor eksternal terbukti memiliki pengaruh terhadap praktek akuntansi pemerintah daerah.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

5.2 Keterbatasan Penelitian

Pengujian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi praktik akuntansi keuangan pemerintahan daerah dalam penelitian ini hanya dilakukan terhadap pemerintahan kabupaten/kota se-Sumatera sehingga dikhawatirkan kemampuan generalisasi untuk mewakili pemerintah daerah di seluruh Indonesia dari penelitian ini tidak cukup kuat. Keterbatasan lain dari penelitian ini adalah kelemahan yang melekat pada indeks kepatuhan yang digunakan dalam penelitian ini karena indeks ini tidak mengukur opini audit dan tidak mampu menangkap salah saji material yang mungkin terjadi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah sehingga dikhawatirkan daerah-daerah dengan opini audit yang lebih jelek akan unggul dalam pengukuran praktik akuntansi yang dinilai berdasarkan indeks kepatuhan tersebut.

Terakhir, peneliti hanya berfokus pada indikator-indikator yang mendukung faktor-faktor sosioekonomi, politik dan eksternal antara lain ukuran daerah, kemandirian daerah, tingkat kesejahteraan, dukungan politik, kompetisi politik, dan

pemerintah pusat dalam melihat kepatuhan pengungkapan praktek laporan keuangan pemerintah daerah. Sebagai perbandingan, Misra (2008) menguji dengan melihat faktor profesionalisme staf yang menyusun laporan keuangan serta indikator lain yang mendukung faktor eksternal yaitu kekuataan legislatif yang dilihat dari jumlah anggota DPRD yang duduk di Komisi Ekonomi/Keuangan/-Anggaran.

5.3 Implikasi

Terlepas dari berbagai keterbatasan yang ada, hasil penelitian dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga pelaporan keuangan yang disampaikan dapat berfungsi secara maksimal sebagai salah satu media pertanggungjawaban (*accountability*) dan transparansi pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. Dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, pemerintah daerah hendaknya mempertimbangkan berbagai faktor yang ikut mendukung dan mempengaruhi praktek tersebut.

Temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi beberapa pihak. Pertama, bagi para pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya anggota legislatif (DPRD), mekanisme *cheks and balance* terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh eksekutif perlu terus ditingkatkan disamping membenahi diri dengan pengetahuan yang memadai tentang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan daerah. Dengan demikian, diharapkan para pengambil keputusan, termasuk legislatif, dapat lebih baik dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah dan dapat menggunakan informasi

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan dan kebijakan ekonomi, sosial dan politik di daerah. Selanjutnya, bagi pemerintah pusat selaku regulator dalam pembuatan SAP, hasil penelitian ini dapat dijadikan tolok ukur penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam LKPD. Selain itu, pemerintah pusat dapat dasar evaluasi, masukan dan pertimbangan untuk bisa menentukan penilaian atau bahkan *punishment* dan *reward* yang bisa diterapkan dalam hal pengungkapan wajib sesuai SAP yang harus dilakukan pemerintah daerah. Terakhir, bagi pemerintah daerah sebagai pengguna SAP, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pengungkapan laporan keuangan yang dilaporkan telah sesuai dengan Peraturan SAP yang berlaku khususnya di wilayah se-Sumatera.

Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik, khususnya akuntansi pemerintahan, dapat menjadi tambahan referensi dan memotivasi peneliti lain untuk pengembangan penelitian lebih lanjut dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang masih terdapat dalam penelitian ini. Peluang untuk penelitian berikutnya dapat dikembangkan dari penelitian ini dengan berbagai cara. Pertama, penelitian ini dapat dikembangkan dengan sampel yang lebih banyak sehingga kemampuan generalisasinya untuk memperlihatkan praktik akuntansi pemerintahan di Indonesia menjadi lebih kuat. Kedua, penelitian berikutnya dapat dilakukan dengan menambahkan variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini dan dengan meggunakan proksi yang lebih tepat. Sebagai bahan pertimbangan, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) ada 11 indikator utama kondisi sosioekonomi

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

di Indonesia sementara penelitian ini hanya memilih 3 diantaranya dengan alasan ketiga variabel inilah yang paling banyak digunakan sebagai indikator kondisi sosioekonomi dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Ketiga, penelitian ini dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan opini laporan keuangan auditan dalam pengukuran praktik akuntansi keuangan pemerintah daerah.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA